

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ely Susanto. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- I Nyoman Sumaryadi. 2016. *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mahfud. MD. 1998. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Miftah Thoha. 2008. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miftah Thoha. 1993. *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta: WM Mandala.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M Hadjon & R. Sri Soemantri Martosoewignjo. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Septi Nur Wijayanti & Iwan Satriawan. 2009. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- S.F. Marbun. 1998. *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sondang Siagian. 2005. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih & Tedi Sudrajat. 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjahjo Kumolo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Expose.

Jurnal

- Bagus Sarnawa. "Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*. Volume 20. Nomor 1. (Juni 2017).
- Hayat. "Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kerja Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Volume 20. Nomor 2. (November 2016).

- M. Adian Firnas. "Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi". *Jurnal Review Politik*. Volume 6. Nomor 1. (Juni 2016).
- Rina Martini. "Politisasi Birokrasi di Indonesia". *Jurnal Ilmu Politik*. Volume 1. Nomor 1. (April 2010).
- Septi Nur Wijayanti. "Keterlibatan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Konstitusi*. Volume 2. Nomor 1. (September 2013).
- Sri Hartini. "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 9. Nomor 3. (September 2009).
- Tatang Sudrajat. "Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak 2015". *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 12. Nomor 3. (Desember 2015).
- Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona. "Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara". *Jurnal Media Hukum*. Volume 23. Nomor 1. (Juni 2016).
- Yusdianto. "Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya". *Jurnal Konstitusi*. Volume 2. Nomor 2. (November 2010).
- Zamzami. "Kontroversi Netralitas PNS dalam Pilkada". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1. Nomor 1. (Maret 2009).

Berita Online

- Anonim. 2015. "Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Jakarta: Pemerintah.net (diakses pada tanggal 27 November 2018 Pukul 20.50).
- Anonim. 2016. "Menurut Sekda, Inilah Penyebab PNS Tidak Netral". Batang: Jpnn.com (diakses pada tanggal 29 September 2018 Pukul 13.26).
- Humas MENPANRB. 2015. "Bentuk Satgas, Bukti Komitmen Kementerian PANRB Tegakkan Netralitas ASN". Jakarta: www.menpan.go.id (diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 21.57).
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2018. "SE Menteri PANRB: asn Istri/Suami Peserta Pilkada Serentak 2018". Jakarta: setkab.go.id (diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 22.27).
- Tantowi Alwi. 2018. "Tahun Pilkada 2018, Politik Uang Hingga Netralitas ASN Jadi Perhatian PUKAT UGM". Yogyakarta: Tribunjogja.com (diakses pada tanggal 29 September 2018 Pukul 11.47).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan PNS dan Pejabat Negeri dalam Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
- Surat Edaran Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri yang Mendjalankan Kewajiban Negara di Luar Djabatan yang Dipanggunja.
- Surat Edaran Nomor SE/18/1/M.PAN/5/2004 perihal Sanksi Bagi PNS yang Terlibat dalam Kampanye Pemilu 2004.
- Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor: B/2355/M.PANRB/07/2015 perihal Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak.
- Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor: B/3235/M.PANRB/10/2015 perihal Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor: B/3236/M.PANRB/07/2015 perihal Pengawasan Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap Netralitas PNS dalam Pilkada Serentak.
- Surat Edaran Menteri PANRB Nomor: SE/06/M.PAN-RB/11/2016 tentang Pelaksanaan Netralitas dan Penegakan Disiplin serta Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara Serentak Tahun 2017.

Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor: 36/M.SM.00.00/2018, perihal Ketentuan Bagi ASN yang Suami atau isterinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil/Calon Anggota Legislatif/Calon Presiden.